

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (STUDI PERKARA NOMOR 12/PDT.SUS-PHI/2019/PN.TJK)

Oleh

Kharisty Aulia Alan

Perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada tenaga kerja karena tenaga kerja telah melanggar ketentuan isi dari perjanjian kerja bersama namun tenaga kerja tidak setuju dengan keputusan perusahaan. Selanjutnya, tenaga kerja membawa perkara ini ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Tanjungkarang Kelas IA dengan kasus nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn.Tjk. Tenaga kerja menuntut hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apa akibat hukum dari perjanjian kerja bersama antara tenaga kerja dengan PT. Indomarco Adi Prima?, (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam perjanjian kerja bersama PT. Indomarco Adi Prima?, (3) Apakah dasar pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam memutuskan perkara No. 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tjk?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Data dan Sumber yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara di Pengadilan Tanjung Karang Kelas IA. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi bahan dan sistematis bahan hukum. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan antara lain: Akibat hukum dari perjanjian kerja bersama antara tenaga kerja dengan PT. Indomarco Adi Prima yaitu timbul hak-hak dan kewajiban dari para pihak yaitu perusahaan dan tenaga kerja, Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dan Pada kasus nomor: 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tjk Majelis Hakim menyatakan bahwa tenaga kerja tidak termasuk melakukan kesalahan berat

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perjanjian

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION OF LABOR AGAINST TERMINATION (PHK)
BASED ON COLLECTIVE LABOR AGREEMENT
(STUDY CASE NUMBER 12/PDT.SUS-PHI/2019/PN.TJK)****Written By*****Kharisty Aulia Alan***

The company terminated the employment due to termination of employment (PHK) for workers the workforce has violated the provisions of the contents of the collective labor agreement but the workforce does not agree with the company's decision. Furthermore, the workforce brought this case to the industrial relations court at the Tanjungkarang District Court Class IA with case number 12/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn.Tjk. Workers demand their rights under the Manpower Act. The problems in this study are (1) What are the legal consequences of a collective labor agreement between workers and PT. Indomarco Adi Prima?, (2) What is the form of legal protection for workers in the collective work agreement of PT. Indomarco Adi Prima?, (3) What is the basis for consideration of the judges of the Industrial Relations Court at the Tanjung Karang District Court in deciding case No. 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tjk?

This type of research uses empirical normative research with descriptive research type. The problem approach used is a normative legal approach. Data and sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Methods of data collection by literature study, document study and interviews at the Tanjung Karang Court Class IA. The data processing method is through data checking, data marking, material reconstruction and systematic legal material. Data analysis used qualitative analysis.

The results of the research and discussion include: The legal consequences of a collective labor agreement between workers and PT. Indomarco Adi Prima, namely the rights and obligations of the parties, namely the company and the workforce. Legal protection is divided into 2 (two), namely preventive legal protection and repressive legal protection and In case number: 12/Pdt.Sus-PHI/2019 /PN.Tjk The Panel of Judges stated that the workforce does not include serious mistakes.

Keywords: Legal Protection, Manpower, Agreement